

Muhammad Mustafa  
Parjiyana

PUBLIKa, Vol 2, No. 2 Hal. 182-196 (2016)

## PELAKSANAAN PROGRAM PROYEK KERJA MASYARAKAT (POKMAS) DI DESA MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK

Oleh

**Muhammad Mustafa dan Parjiyana**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

### ABSTRACT

*Muara Sungai Kelantan Mandau Siak Regency is one of the villages located far to the center of the district capital of Siak and including one isolated region. This village requires the construction of infrastructure and public facilities in order to improve people's welfare. The government has many programs in an effort to increase the development of this infrastructure to be felt in isolated areas in Siak and one of them is with the Community Work Program (Pokmas) corresponding decree No. 29 Year 2013. Pokmas Fund in accordance with the technical guidelines issued by the Regent Siak who explained that the funds Pokmas used for the construction of public infrastructure and public facilities. The purpose of this study is to identify and explain the implementation of the Community Work Program Project (community groups) in the village of Muara Sungai Kelantan Mandau Siak and constraints. The method used is descriptive and quantitative methods; Samples that all parties involved in the implementation of community groups and community programs Mandau Sungai Siak Regency as many as 48 people. Techniques of data collection questionnaire and interview and descriptive data analysis. This study concluded that the Community Work Program Implementation Project (community groups) in the village of Muara Sungai Kelantan Mandau Siak in the unfavorable category. The obstacles that occur in the role of Rural Community Muara Kelantan River District Mandaudalam planning of development programs, namely: a society that did not participate berpartisipatif in carrying out development programs, the length of the disbursement of funds so that development programs can not be run smoothly and in the organization of the Village Community Muara Sungai Kelantan Mandaumasih there are members who are less active role in the development program.*

*Keywords: implementation, pokmas*

### ABSTRAK

Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak merupakan salah satu desa yang jauh dengan pusat ibu kota Kabupaten Siak dan termasuk dari salah satu wilayah terisolir. Desa ini memerlukan pembangunan infrastruktur dan sarana-sarana publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah memiliki banyak program dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur ini agar terasa hingga ke daerah-daerah terisolir di Kabupaten Siak dan salah satunya yaitu dengan adanya Program Kerja Masyarakat (POKMAS) sesuai Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2013. Dana POKMAS sesuai dengan petunjuk teknis yang di keluarkan oleh Bupati Siak yang menjelaskan bahwa dana Pokmas di gunakan untuk pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak serta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif; Sampel yaitu seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan program POKMAS dan masyarakat Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak sebanyak 48 orang. Teknik pengumpulan data kuisioner dan wawancara serta analisis data secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dalam kategori cukup terlaksana. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam peranan Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau dalam perencanaan program pembangunan yaitu : adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipatif dalam menjalankan program-program pembangunan, lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar dan dalam organisasi Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan, POKMAS

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa sangat di dukung oleh masyarakat, dalam artian keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Semboyan bahwa "desa itu milik masyarakat desa" berarti masyarakat desa harus merasa masyarakat desalah yang harus membangun desa" sudah seharusnya betul-betul dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat desa. Makna semboyan ini terkait erat dengan partisipasi masyarakat yang sering kali kita dengar, baik melalui media cetak, radio, televisi maupun media-media lainnya. Partisipasi diartikan sebagai suatu kondisi dimana semua komponen masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam kaitannya dengan akses, kontrol dan suara. Partisipasi merupakan hak dan kewajiban masyarakat yang sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan kita.

Pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, masyarakat yang mengetahui kebutuhan dalam hal pembangunan yang ada di Desanya berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki, akibatnya berbagai masalah timbul dihadapan masyarakat antara lain pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasilnya tidak dapat mengangkat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah desa.

Sejak digulirkannya program Kelompok Kerja Masyarakat (POKMAS) pada tahun 2006 di Kabupaten Siak, kini program tersebut terus meningkat dan telah berdiri 2.485 Pokmas. Tujuan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/kelurahan adalah untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum serta fasilitas sosial dengan berdasarkan Peraturan Bupati No.29 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan hibah khusus keuangan kelompok masyarakat desa/kelurahan tahun anggaran 2014.

Berdasarkan tujuan dari tujuan penerapan program yaitu untuk mengurangi daerah terisolir dan mempermudah pemasaran disini dengan pembangunan jalan semenisasi menuju sawah dengan adanya pembangunan jalan tersebut mempermudah masyarakat menjual hasil panen, penciptaan lapangan pekerjaan dengan diadanya program ini yaitu seperti pembangunan POKMAS 2012 masyarakat yang menganggur mendapatkan pekerjaan sehingga sedikit mengurangi pengangguran dengan demikian pelaksanaan program ini melibatkan peran aktif masyarakat walaupun tidak secara keseluruhan masyarakat.

Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak merupakan salah satu desa yang jauh dengan pusat ibu kota kabupaten siak dan

termasuk dari salah satu wilayah terisolir. Desa ini memerlukan pembangunan infrastruktur dan sarana-sarana publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah memiliki banyak program dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur ini agar terasa hingga ke daerah-daerah terisolir di Kabupaten Siak dan salah satunya yaitu dengan adanya Program Kerja Masyarakat (POKMAS) sesuai Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2013. Dana POKMAS sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bupati Siak yang menjelaskan bahwa dana Pokmas digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum, seperti: Melaksanakan pembangunan sederhana, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Untuk mengetahui jenis program, kelompok pelaksana serta biaya dalam POKMAS pada Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dapat diketahui beberapa fenomena tentang pelaksanaan POKMAS di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan POKMAS tahun 2013 belum terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, dimana jalan Desa Muara Kelantan khususnya pada RT.02 dan RT.03 merupakan pemukiman masyarakat yang padat penduduk dan sentra perkebunan hanya memiliki jalan semenisasi padahal jalan tersebut merupakan akses utama sebagian masyarakat menuju kebun. Kualitas jalan yang dibangun belum sesuai harapan, jalan yang dibangun rusak sebelum habis jangka waktu pembangunannya.
2. Pada pelaksanaan pembangunan mushola dan ruang guru MDA, yang

terkendala dalam pembangunannya dikarenakan pembangunan belum selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan belum ada tindakan tegas yang diberikan oleh tim pengawas dari tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. sementara itu sekarang sudah berjalan program pembangunan pokmas untuk tahun selanjutnya.dari permasalahan diatas jelas terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh tim kecamatan dan tim kabupaten tidak efektif dan efisien.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

### **Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik.
2. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
3. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan terutama bagi kepala desa dalam pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

## STUDI KEPUSTAKAAN

### Konsep Administrasi

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Menurut Siagian (2003: 2) mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37) adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-faktasecara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lain.

Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Syafiie (2003:32) dalam bukunya “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari administrasi Negara, yaitu:

- a. Tidak dapat dielakan (unavoidable)
- b. Senantiasa mengharapakan ketaatan (expect obedience)
- c. Mempunyai prioritas (has priority)
- d. Mempunyai pengecualian (has exceptional)
- e. Puncak pimpinan politik (top management political)
- f. Sulit diukur (difficult to measure)
- g. Terlalu banyak mengharapakan dari administrasi public (more is expected of public administration)

### Konsep Manajemen

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2007:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (oraganisasi)
- c. Staffing (kepegawaian)
- d. Motivating (motivasi)
- e. Controlling (pengawasan)

### Konsep Pembangunan

Menurut Mustopadidjaja seperti dikutip Haryono (2002) Administrasi pembangunan di definisikan sebagai suatu ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu system administrasi Negara dilakukan sehingga system administrasi mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Administrasi pembangunan lebih berorientasi pada peranan serta fungsi pemerintah Negara-negara berkembang dalam pembangunan nasionalnya. Sedangkan administrasi Negara lebih berorientasi untuk lebih memajukan usaha pembangunan Negara. Ciri pendekatan administrasi pembangunan lebih maju dari pada administrasi

Negara, hal ini dapat dilihat dari hal cirri utamanya yaitu:

1. Orientasi administrasi pembangunan di arahkan pada usaha-usaha untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik.
2. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi yang dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang lain, seperti ekonomi, sosial, dan lainnya.

### Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Muhajir (dalam Imron, 1995:81) mengatakan menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tipologinya ialah partisipasi kuantitatif dan kualitatif, partisipasi kualitatif menunjukkan kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan sementara partisipasi kualitatif menunjukkan kepada tingkat dan derajat.

"Partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya". (Uphoff, 1992). (dikutip dari <http://wahyukis.blogspot.com/2007>)

Berdasarkan dari penjelasan para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Partisipasi masyarakat ini baik Kontjoroningrat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaannya maupun menikmati hasilnya.

Dalam Imron (1995:81) Menggolongkan partisipasi masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus. kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan.

Menurut Thoha (1990) mengemukakan bahwa partisipasi adakalanya dilakukan secara mandiri dan ada kalanya dengan mobilisasi. partisipasi mandiri adalah suatu usaha berperan serta yang dilakukan sendiri oleh pelakunya untuk mempengaruhi policy yang bakal di buat. partisipasi mobilisasi adalah keikutsertaan rakyat dalam berperan serta untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan dengan cara dimobilisasi oleh pihak lain.

### Operasional Variabel

**Tabel 1 : Operasional variabel penelitian tentang Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak tahun 2013**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai	Skala Ordinal
Pelaksanaan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan	pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan	1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif	a. Dilibatkannya Masyarakat dalam penyusunan pembangunan desa b. Masukan Masyarakat dijadikan pertimbangan dalam	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. (Wahab, 2008:52)	Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat	<p>c. penetapan kebijakan pembangunan</p> <p>c. Pemerintah desa tidak memaksakan kehendak pada Masyarakat</p> <p>a. Menghimbau masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan</p> <p>b. Menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan</p> <p>c. Meminta masyarakat untuk menyumbangkan pikiran, biaya, waktu dan tenaga untuk kegiatan pembangunan</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Kurang</p> <p>Terlaksana</p>
		3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan	<p>a. Program pembangunan yang disusun dan dijalankan sesuai dengan rencana</p> <p>b. Program-program pembangunan diawasi pelaksanaannya</p> <p>c. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperbaiki untuk kegiatan pembangunan</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Kurang</p> <p>Terlaksana</p>

Sumber: *Modifikasi Peneliti, 2016*

### Teknik Pengukuran

**Terlaksana** : Apabila total skor yang di peroleh responden dalam menilai Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

tahun 2013 berkisar > 67%.

**Cukup Terlaksana** : Apabila total skor yang diperoleh responden dalam menilai Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan

Kecamatan Sungai  
Mandau  
Kabupaten Siak  
tahun 2013  
berkisar antara  
34% - 66%.

tahun 2013 berkisar  
antara < 33%.

Kurang Terlaksana : Apabila total skor yang di peroleh responden dalam menilai Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif dengan menggunakan survey deskriptif yaitu penelitian dengan maksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan komprehensif terhadap suatu fenomena sosial, kemudian peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak tahun 2013.

## Populasi dan Sampel

**Tabel 2 : Populasi dan Sampel Tentang Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Tim Pengendali Kecamatan	4	1	25
2.	Kepala Desa	1	1	100
3.	Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)	5	1	20
4.	Masyarakat (KK)	413	41	10
Jumlah		423	44	11

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2015

## Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Yaitu data penelitian yang diperoleh dengan cara penelitian langsung ke lapangan baik dengan menyebarkan angket guna mendapatkan tanggapan dari responden.

### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah ada dan diperoleh langsung dari Desa Muara Kelantan yang berupa dokumen-dokumen, laporan atau buku-buku mengenai gambaran umum Desa

Muara Kelantan, gambaran umum masyarakat Desa Muara Kelantan baik dari segi ekonomi, pendidikan, agama, sosial budaya dan sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Data

### 1. Angket (Kuesioner)

Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau

Kabupaten Siak. Semua pernyataan dalam angket atau kuesioner tersebut disajikan dalam bentuk skala likert yang disesuaikan dengan pertanyaan dan ditambah dengan pertanyaan tertutup. Adapun untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditinjau dari tiap-tiap sub indikator penelitian, maka peneliti menggunakan angket atau kuesioner dengan pola jawaban sebagai berikut:

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada kepala desa yaitu dipergunakan pada awal penyusunan proposal penelitian terutama memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Muara Kelantan. Hasil wawancara dipergunakan untuk menambah keakuratan data dan informasi yang lebih jelas.

3. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Yang diobservasi yaitu memantau secara langsung atau tindakan yang dilakukan dalam pembangunan di Desa Muara Kelantan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan agar dapat menunjang dan merumuskan suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada di kuesioner dan wawancara.

## PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak**

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan

desa sangat di dukung oleh masyarakat, dalam artian keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Semboyan bahwa "desa itu milik masyarakat desa" berarti masyarakat desa harus merasa masyarakat desalah yang harus membangun desa" sudah seharusnya betul-betul dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat desa. Makna semboyan ini terkait erat dengan partisipasi masyarakat yang sering kali kita dengar, baik melalui media cetak, radio, televisi maupun media-media lainnya. Partisipasi diartikan sebagai suatu kondisi dimana semua komponen masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam kaitannya dengan akses, kontrol dan suara. Partisipasi merupakan hak dan kewajiban masyarakat yang sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan kita.

Pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, masyarakat yang mengetahui kebutuhan dalam hal pembangunan yang ada di Desanya berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki, akibatnya berbagai masalah timbul dihadapan masyarakat antara lain pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasilnya tidak dapat mengangkat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan



dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah desa.

### 1. Menyusun Rencana Pembangunan Yang Partisipatif

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator menyusun rencana pembangunan yang partisipatif yang dapat dinilai dari dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan pembangunan desa, masukan masyarakat dijadikan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pembangunan dan pemerintah desa tidak memaksakan kehendak pada Masyarakat.

**Table 3 : Distribusi penilaian responden terhadap indikator menyusun rencana pembangunan yang partisipatif pada pembangunan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Dilibatkannya Masyarakat dalam penyusunan pembangunan desa	11	21	9	41
2.	Masukan Masyarakat dijadikan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pembangunan	15	22	4	41
3.	Pemerintah desa tidak memaksakan kehendak pada Masyarakat	12	24	5	41
Jumlah		38	67	18	123
Rata-rata		13	22	6	41
Persentase		32	53	15	100

Sumber : Olahan Penelitian, 2016

Program kerja disini dimaksud sebagai bentuk jadwal pembangunan yang akan dilakukan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau yang meliputi latar belakang dilakukan pembangunan, rincian biaya serta tahap-tahap yang akan dilakukan dalam pembangunan tersebut. Sementara pembinaan teknis merupakan pembimbing masyarakat yang ditunjuk Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau sebagai penunjuk untuk menjalankan program pembangunan yang akan dilakukan. Dan fasilitas untuk teknik pembinaan yang berguna sebagai alat untuk menjalankan pembangunan desa yang disediakan oleh Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau diambil dari

anggaran yang telah disediakan kemudian masyarakat yang akan mengerjakan atau turun tangan langsung dalam mengerjakan pembangunan desa dengan dibimbing oleh tenaga teknis

Berdasarkan hasil observasi penulis kelapangan, penyusunan program yang telah dilakukan antara lain perterlaksanaan dan pengerasan jalan, jalan yang semula berlubang dan tidak rata diperterlaksanai dan dikeraskan lagi agar msayarakat mudah untuk dilewati masyarakat pengguna jalan. Sementara program yang akan dilaksanakan yaitu bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat dari Pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya serta penyaluran modal usaha

masyarakat melalui program perekonomian desa.

Banyaknya hasil tanggapan responden dan hasil wawancara maka dapat disimpulkan menyatakan kurang terlaksana. Sebagian masyarakat tersebut bertanggapan bahwa program pemberdayaan yang akan dilaksanakan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai

Mandau kurang dimengerti oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat yang mendapat pembinaan teknis yang akan dilakukan. Tidak menyeluruhnya pelaksanaan teknis yang akan dilakukan ini membuat informasi yang didapat masyarakat tidak sama sehingga dapat menyebabkan perdebatan antar masyarakat satu dengan yang lainnya.

## 2. Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat yang terdiri dari menghimbau

masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan, menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan dan meminta masyarakat untuk menyumbangkan pikiran, biaya, waktu dan tenaga untuk kegiatan pembangunan.

**Table 4 : Distribusi penilaian responden terhadap indikator menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Menghimbau masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan	10	22	9	41
2.	Menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan	8	22	11	41
3.	Meminta masyarakat untuk menyumbangkan pikiran, biaya, waktu dan tenaga untuk kegiatan pembangunan	9	20	12	41
Jumlah		27	64	32	123
Rata-rata		9	21	11	41
Persentase		22	51	27	100

Sumber : Olahan Penelitian, 2016

Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dapat dilihat dari himbauan langsung terlaksana dari kepala desa maupun lembaga adat desa agar masyarakat dapat bahu membahu bersama-sama melakukan pembangunan desa yang juga bermanfaat pada dampak kemajuan desa. Dengan gotong royong

yang dilakukan oleh masyarakat maka pembangunan yang direncanakan dan diprogramkan dapat berjalan dengan terlaksana dan siap dengan tepat waktu. Tetapi pada kenyataannya masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau ini kurang tergerak dalam melakukan gotong royong dengan

alasan pekerjaan yang tidak bias ditinggalkan dengan demikian masyarakat hanya menyumbang materi atau uang sumbangan untuk pembangunan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis melihat dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan banyak masyarakat yang tidak ikut bergotong royong dengan alasan karena sedang bekerja, hal ini tentu saja dapat menghambat dalam penyelesaian pembangunan yang sedang dilakukan. Banyak terlihat ibu-ibu masyarakat yang dapat secara bergantian untuk menyediakan minuman serta makanan bagi masyarakat yang bergotong royong. Tetapi observasi yang dilakukan pada hari libur kerja jumlah masyarakat yang dapat dalam bergotong royong menjadi banyak karena masyarakat tersebut juga libur dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Menggerakkan

swadaya gotong royong masyarakat kurang terlaksana dilakukan oleh kepala desa maupun lembaga adat desa lainnya. Hal ini harus menjadi panutan bagi kepala desa sebagai perangkat tinggi di desa dalam menyusun program pembangunan tanpa harus mengorbankan pekerjaan masyarakat lainnya tetapi pembangunan tetap berlangsung dengan terlaksana dan dapat selesai dengan tepat waktu.

### 3. Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau yang terdiri dari program pembangunan yang disusun dan dijalankan sesuai dengan rencana, program-program pembangunan diawasi pelaksanaannya dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperterlaksanai untuk kegiatan pembangunan.

**Table 5 : Distribusi penilaian responden terhadap indikator penyusunan petunjuk teknis pengembangan desa pada Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Program pembangunan yang disusun dan dijalankan sesuai dengan rencana	14	24	3	41
2.	Program-program pembangunan diawasi pelaksanaannya	10	22	9	41
3.	Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperterlaksanai untuk kegiatan pembangunan	15	21	5	41
Jumlah		39	67	17	123
Rata-rata		13	22	6	41
Persentase		32	53	15	100

Sumber : Olahan Penelitian, 2016

Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan pada Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau ini dapat dilihat dari program pembangunan yang telah dilakukan dan selama program pembangunan selalu diadakan pengawasan agar dapat selesai dengan terlaksana dan tepat waktu. Masalah yang terjadi dalam pembangunan desa ini hanya berkisar mengenai partisipasi masyarakat desa yang kurang terlaksana saja tetapi dalam segi pendanaan sudah terpenuhi dengan terlaksana. Penyimpangan yang terjadi karena kurangnya anggota masyarakat yang ikut bekerja sehingga pembangunan terkadang tidak sesuai dengan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti kelapangan bahwa dapat dilihat pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang bergotong royong dan diawasi oleh masyarakat tersebut juga.

Kepala desa sebagai penggerak hanya memantau pembangunan tidak rutin karena juga memiliki kesibukan sendiri. Penyimpangan yang ditemui dari pelaksanaan pembangun tersebut hanya dilihat dari tidak adanya pengawasan dari tenaga ahli yang mengetahui secara jelas mengenai pembangunan yang dilakukan sehingga pembangunan bias saja siap dengan tidak optimal dan dapat terjadi kerusakan lagi pada pemabangunan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kelapangan tersebut maka dapat diketahui Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan pada Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau kurang terlaksana dilakukan, dengan alasan pembangunan yang dilakukan tidak diawasi dengan terlaksana oleh kepala desa dan tenaga ahli sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan dapat saja terjadi.

**Tabel 6 : Rekapitulasi penilaian responden terhadap Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak**

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif	13	22	6	41
2.	Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat	9	21	11	41
3.	Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan	13	22	6	41
Jumlah		35	65	23	123
Rata-rata		12	21	8	41
Persentase		29	52	19	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program proyek kerja masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dalam kategori cukup terlaksana yaitu sebesar 52 % yang menyatakan cukup terlaksana. Hal ini

disebabkan dalam pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak masih dijumpai beberapa permasalahan, khususnya masalah dana yang tersedia untuk kelangsungan program sehingga program ini tidak selesai dengan tepat waktu.

Masyarakat yang berperan dalam membantu kelangsungan program masyarakat ini pun tidak berperan aktif ikut menjaga sarana prasarana yang disediakan.

**Hambatan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP- Nagari) pemerintah kenagarian indrapura tengah (Studi Evaluasi)**

1. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan. Dalam melaksanakan program-program pembangunan yang disusun oleh Masyarakat Desa Muara Kuantan, peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar besar saja yang datang turut membantu dalam mengerjakan pembangunan yang akan dilakukan.
2. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pembangunan tersebut. Adanya dana tersebut baik berasal dari PEMDA maupun Yayasan. Akan tetapi lancarnya program-program pembangunan tidak sejalan dengan lancarnya pencairan dana, hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana yang lama prosedurnya. Berdasarkan survey lapangan tenaga teknis maupun masyarakat bertanggung pencairan

dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak tepat waktu dicairkan pihak Pemerintah setempat, oleh karena itu pembangunan jadi terhambat.

3. Dalam organisasi Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut. Seharusnya setiap anggota tetap Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau sudah ada tugas-tugasnya masing-masing, akan tetapi ada juga anggota Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kesadaran anggota tersebut sehingga program pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan lancar dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

**Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (Pokmas) di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dalam kategori kurang baik.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam peranan Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau dalam perencanaan program pembangunan yaitu :
  - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.
  - b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.
  - c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau masih ada anggota yang

kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

### Saran

1. Bagi Pemerintah Desa diharapkan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pembangunan untuk kemajuan masyarakat desa itu sendiri.
2. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran, maka Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pembangunan desa. Peranan Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat harus semakin ditingkatkan dan untuk itu anggota Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau harus dapat menyediakan waktu untuk menerima dari setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat desa, baik yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan.
3. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk materi maka pemerintah desa bersama dengan Masyarakat Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau yang ada hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang telah bersedia menyumbang hartanya untuk kelancaran proses pelaksanaan pembangunan desa, tentunya dengan memanfaatkan dana swadaya tersebut. Selanjutnya membuat laporan secara tertulis, terperinci, dan transparan kepada masyarakat tentang realisasi kegunaan dana swadaya yang telah dimanfaatkan tersebut. Laporan tersebut hendaknya diketahui oleh

seluruh masyarakat desa, sehingga dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat lainnya secara ikhlas untuk berpartisipasi dalam bentuk materi.

### Daftar Kepustakaan

- Aristo, 2004. *Rejuvinasi Peran Perencanaan dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “ Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”* Malang. Universitas Brawijaya.
- Angsari. 2001. *Peranan Agen Pembaharuan/penyuluh dalam Usaha Memberdayakan Sumber Daya Manusia*. Bogor. IPB Press
- Awang, Azam (Ndraha, 2006) *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*, Graha Undri Press Pekanbaru Riau
- Creswell John W. 2002. *Research Desain (Desain Penelitian pendekatan kualitatif & kuantitatif)*. Jakarta: Kik Press
- Dunn William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Dror, Yehezkel. 1968. *Public Policymaking Reexamined*, San Francisco: Chandler.
- Friedman, JE. 1992. *The Politics of Alternative Development*
- Koryati. Nyimas Dwi, dkk. 2005, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, YPAPI, Yogyakarta.
- Marbun, 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta. Pustaka Harapan
- Nitisemito, Alex. 1982. *Manajemen Personalia*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Nugroho Riant. 2004. *Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan*

- Evaluasi*. Jakarta. PT. Alex Media Komputindo.
- Nogi S. Tangkilisan, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Prajudi, Atmosudirdjo. 1966. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Grialia Indonesia
- Prijono, dan AMW Pranaka, 1996. *Pemberdayaan, Konsep dan Implementasi*, Jakarta, CSIS
- Pasalong, Harbani, 2007 *Teori administrasi public*, Alfabeta, Bandung.
- Ragawino Bewa, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Universitas Padjadjaran Pers.
- Ropke, Jochen (2003). *Ekonomi Koperasi teori dan manajemen*. Jakarta. Salemba Empat
- Siagian, Sondang P. 1995, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gunung Agung.
- Simatupang, 1970. *Membangun Manusia Pembangunan*. Bandug Rosda
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta. LP3ES.
- Slamet, 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor, IPB Press
- Sudijono, Anas. 2004. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung Alfabeta
- Soewarno Handayaniingrat. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- The Liang Gie. 1980. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Nur Cahaya
- Usman, Santoyo, 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dokumentasi**
- UUD 1945 pasal 27 dan 28
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa